

ANALISIS PENGARUH INDEKS PERSEPSI KORUPSI, KEMISKINAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA NEGARA - NEGARA ASEAN TAHUN 2015 - 2023

Salwa Mufidah^{1*}, Muhammad Iqbal², Taufiqur Rahman³

^{1,2,3}Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
salwamufidah16@gmail.com^{1*}, m.iqbal@radenintan.ac.id², taufiqur@radenintan.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks persepsi korupsi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di negara - negara ASEAN pada periode 2015 - 2023. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari laporan resmi dan statistik internasional, yang kemudian dianalisis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi panel. Hasil analisis secara simultan mengungkapkan bahwa keseluruhan variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan di negara - negara ASEAN untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memprioritaskan pengentasan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dapat dicapai secara inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the corruption perception index, the poverty rate, and the unemployment rate on economic growth in ASEAN countries during the period 2015–2023. The data used in this research are secondary data sourced from official reports and international statistics, which were then analyzed using a quantitative method with a panel regression approach. The simultaneous analysis reveals that the overall variables have a significant impact on economic growth in the ASEAN region. This study provides recommendations to policymakers in ASEAN countries to improve government governance, reduce economic disparities, and prioritize both poverty alleviation and job creation. Consequently, economic development can be achieved in an inclusive and sustainable manner. Keywords: Corruption Perception Index, Poverty, Unemployment, Economic Growth

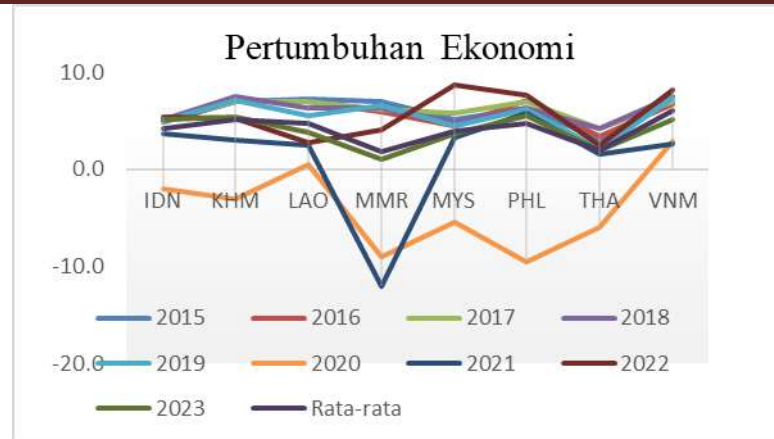
PENDAHULUAN

Perhimpunan bangsa - bangsa dalam Asia Tenggara yaitu *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) didirikan pada 8 Agustus 1967. Keberagaman ekonomi dan pola dari pemerintahan dapat mempengaruhi kualitas dari kawasan Asia Tenggara, karena setiap wilayah memiliki karakteristik serta kondisi ekonomi yang berbeda-beda (Natasya & Saputra, 2023). Perkembangan perekonomian negara anggota Asean dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP).

Pertumbuhan ekonomi dengan pengukuran Produk Domestik Bruto (PDB), mencerminkan

peningkatan nyata dalam produksi barang dan jasa, serta pendapatan masyarakat dalam periode tertentu (Iqbal, Hakim & Aziz, 2024). Indikator ini digunakan untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat korupsi, kemiskinan, dan pengangguran. Semakin tinggi tingkat korupsi dalam suatu negara, semakin besar kemungkinan alokasi sumber daya ekonomi menjadi tidak efisien, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kondisi sosial masyarakat (Rachmawati, 2022). *Gross Domestic Product* (GDP) negara anggota Asean dapat dilihat pada grafik berikut.





Grafik 1

Data Pertumbuhan Ekonomi ASEAN 2015-2023

Sumber: worldbank.org, data diolah 2025 (Rata-rata)

Berdasarkan grafik 1, diketahui bahwa angka rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 negara anggota Asean tertinggi pada tahun 2015-2023 adalah Vietnam (6%), diikuti oleh Kamboja (5,11%), kemudian Laos (4,71%), Filipina (4,69%), dan Indonesia sebesar 4,13%. Sementara itu, negara-negara Asean lainnya memiliki angka rata-rata pertumbuhan ekonomi dibawah 4%. Selanjutnya, negara-negara Asean lainnya seperti Malaysia (3,86%), Thailand (1,88%) dan Myanmar yang mencatatkan GDP terendah (1,76%). Pada 2020, pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian Asean, namun Vietnam mencatatkan pertumbuhan positif tertinggi 2,9%, akibat adanya stabilitas politik dan kebijakan ekonomi jangka panjang yang konsisten, seperti fokus pada industrialisasi dan modernisasi (Dabla-Norris & Sophia Zhang, 2021). Hal ini terjadi karena kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan menerapkan kebijakan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi yang bervariasi tiap tahunnya dapat pula terjadi karena dipengaruhi oleh tingkat produksi masing-masing negara.

Selama 20 tahun terakhir, Asean memiliki perkembangan yang cukup signifikan dalam tingkat pendapatan perkapita (Lutfi, Zainuri & Diartho, 2020). Namun, berdasarkan laporan terbaru mengenai Indeks Persepsi Korupsi yang terdiri 180 negara, terlihat bahwa 8 dari 11 negara anggota Asean memiliki skor di bawah 50. Hal ini mengindikasikan bahwa lembaga publik di ASEAN masih kurang transparan dan akuntabel, dengan penegakan hukum anti - korupsi yang lemah dan keterlibatan masyarakat sipil yang terbatas. Hal ini disebabkan masih banyaknya lembaga anti-korupsi daerah belum berfungsi

secara optimal, akibat minimnya kemandirian operasional dan sumber daya (Lutfi et al., 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi *Transparency International*, skor rata-rata Indeks Persepsi Korupsi pada negara anggota Asean berbeda sepanjang tahun 2015 - 2023. Skor rata - rata Indeks Persepsi Korupsi tertinggi kedua berada pada negara Indonesia yaitu sebesar 36,8 dan pada tahun yang sama, nilai rata - rata pertumbuhan ekonomi negara Indonesia berada pada angka 4,13%. Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia termasuk ke dalam lima negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2015 - 2023. Sementara itu, skor rata - rata IPK terendah dialami oleh negara Kamboja sebesar 21,4. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi perolehan skor Indeks Persepsi Korupsi yang didapatkan oleh sebuah negara, maka akan semakin baik kondisi perekonomian negara tersebut.

Selaras dengan penelitian (Lutfi et al., 2020), yang menjelaskan bahwa korupsi memberikan kontribusi yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang lebih mengarah pada inefisiensi proses produksi dan misalokasi sumber daya. Hasil yang sama dengan penelitian (Ningsih, Juliprijianto & Hutajulu, 2021), yang menyatakan bahwa IPK berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun disisi lain, penelitian yang dilakukan (Akman & Sapha, 2018), menunjukkan bahwa korupsi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena adanya perbedaan kebebasan ekonomi disetiap daerah.

Kemiskinan telah merampas jutaan rakyat untuk mendapatkan haknya (Sasmita, Anggraeni & Hilal, 2023). Situasi ini menunjukkan ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan,

sandang, papan, pendidikan, dan kebutuhan lain yang mempengaruhi kualitas hidup (Akbar & Rozani, 2021). Dalam beberapa dekade terakhir, kemiskinan tetap menjadi isu yang relevan dan krusial untuk dibahas, baik di tingkat nasional maupun internasional (Akbar & Rozani, 2021). Untuk mengatasi kemiskinan, negara-negara anggota PBB menyepakati agenda pembangunan baru sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) periode 2000 – 2015, yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) ke-70 yang diselenggarakan pada September 2015 di New York, Amerika Serikat, sebanyak 193 pemimpin dunia menandatangani kesepakatan global baru yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Dokumen tersebut mencakup 17 tujuan dan 169 sasaran yang berlaku mulai 2016 hingga 2030, dengan salah satu tujuan utamanya pada poin pertama, yaitu "No Poverty". Hal ini menegaskan bahwa kemiskinan adalah masalah yang dihadapi hampir seluruh negara dan perlu dihapuskan (Syaputra et al., 2020).

Tingkat kemiskinan yang dialami oleh negara Asean cukup mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2023. Merujuk pada data resmi yang diperoleh dari *Asean Statistical Highlights*, tingkat kemiskinan tertinggi tahun 2023 diduduki oleh Negara Myanmar sebesar 25,7%, tingkat kemiskinan di Myanmar naik 0,9% di bandingkan tahun 2022. Selanjutnya pada posisi ke dua dan ke tiga ada negara Kamboja (19,3%) dan Laos (19,1%). Selanjutnya pada posisi ke empat ditempati negara Filipina sebesar 15,5% yang mana turun sebesar 2,6% di bandingkan tahun 2022. Tingkat kemiskinan terendah di negara anggota Asean ditempati oleh negara Vietnam sebesar 3,4% yang turun sebesar 0,8% dibanding tahun 2022.

Tingkat kemiskinan anggota Asean dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, dampak pandemi, ketergantungan sektor tertentu, konflik politik, dan efektivitas kebijakan pemerintah. Konflik politik di Myanmar setelah kudeta militer pada 2021 memperburuk situasi ekonomi dan sosial, yang menyebabkan lonjakan kemiskinan hingga mencapai 25,7% pada tahun 2023. Hal ini diperparah dengan sanksi internasional dan penarikan investasi asing (*Freedom In The World 2024: The Mounting Damage of Flawed Elections and Armed Conflict*, 2024). Disisi lain, negara Vietnam melalui penguatan sektor teknologi dan manufaktur, untuk

mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan dan berhasil pulih lebih cepat dari pandemi COVID-19 dikarenakan fokus pada sektor ekspor manufaktur (*Human Development Report 2023/2024: Reimagining Cooperation In A Polarized World*, 2024). Maka, dapat disimpulkan bahwa negara-negara dengan situasi politik yang stabil dan berhasil mendiversifikasi ekonomi cenderung mengalami penurunan angka kemiskinan. Sebaliknya, negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik atau bergantung pada sektor ekonomi yang rentan lebih berpotensi mengalami peningkatan angka kemiskinan. Disisi lain, tingginya angka kemiskinan dapat menurunkan daya beli masyarakat, sehingga produsen akan kesulitan menjual produk di pasar lokal dan mengurangi produksi dan pada akhirnya menyebabkan perekonomian stagnan atau bahkan menurun karena produksi tidak meningkat (Fajri & Iriani, 2022).

Sebuah penelitian yang dilakukan (Ambya & Ciptawaty, 2022), menyatakan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena alokasi anggaran belanja pemerintah dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Sementara itu, penelitian lain oleh (Somba, Engka & Sumual, 2021), menyatakan bahwa kemiskinan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kemiskinan berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan, dimana mereka dikategorikan miskin karena tidak memiliki pekerjaan (Ferezagia, 2018). Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh tingginya pengangguran terselubung, dimana banyak pekerja musiman yang tidak produktif. Kondisi ini membuat banyak keluarga tetap kesulitan memenuhi kebutuhan meski memiliki pekerjaan (Sasmita et al., 2023).

Tingkat pengangguran yang dialami oleh negara-negara Asean cukup mengalami fluktuasi dari tahun 2015 - 2023. Mengacu pada data yang disediakan secara resmi oleh *Asean Statistical Highlights*, pada tahun 2023 Indonesia mencatat tingkat pengangguran tertinggi sebesar 5,3%, diikuti oleh Filipina di posisi kedua dengan tingkat pengangguran 4,6%. Malaysia menempati posisi ketiga dengan tingkat pengangguran sebesar 3,4%, sedangkan Myanmar berada di posisi keempat dengan tingkat pengangguran 2,5%. Laos menyusul di peringkat kelima dengan tingkat pengangguran 2,4%. Data ini mencerminkan kemampuan masing - masing negara dalam menciptakan lapangan kerja serta kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.



Penelitian (Novriansyah, 2018) menunjukkan bahwa variabel Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hukum Okun menjelaskan hubungan negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan studi empirisnya, Okun menemukan bahwa peningkatan 1% pada pengangguran menyebabkan penurunan 2% pada GDP (Septiatin, Mawardi & Khairur, 2016). Sementara itu, penelitian lain menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan pada pengangguran terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengangguran yang wajar dan terkendali karena pertumbuhan penduduk selama periode penelitian masih dalam batas normal (Natasya & Saputra, 2023).

Berdasarkan uraian diatas, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini yaitu kebijakan pemerintah dalam mengambil tindakan untuk meningkatkan skor Indeks Persepsi Korupsi, menurunkan tingkat Kemiskinan dan Pengangguran. Pemerintah perlu untuk memperhatikan wilayahnya dan meninjau pemerataan ekonomi sesuai dengan karakteristik dan keberagamannya. Selain itu, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan adanya kesenjangan empiris yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun dan mengembangkan model dalam penelitian ini. Penelitian ulang dilakukan karena adanya celah yang ditemukan dalam riset terdahulu (*research gap*). Sehingga, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam keterkaitan mengenai IPK, Kemiskinan, dan Pengangguran dengan Pertumbuhan Ekonomi di negara anggota Asean tahun 2015 - 2023.

TINJAUAN PUSTAKA

Indeks Persepsi Korupsi

Kata 'korupsi' bersumber dari kata "*Corruptie/Korruptie*" (Belanda) yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Rasyidi, 2015). Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI) adalah indikator agregat yang menyediakan berbagai sumber informasi mengenai korupsi, sehingga dapat membandingkan tingkat korupsi di setiap negara (Fajar & Azhar, 2018). IPK pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Dr. Johann Graf Lambsdorf pada tahun 1995 dari *Transparency International* (TI) dengan skala penilaian skor 0

(sangat korup) – 100 (sangat bersih) (Lutfi et al., 2020).

Berdasarkan ketentuan pada pasal 2 dan 3 Undang - undang Tipikor, indikator perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi yaitu; tindakan melawan atau melanggar hukum; tindakan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu; tindakan yang dapat merugikan perekonomian negara; penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta sarana yang berkaitan dikarenakan jabatan atau kedudukannya (Wihelmus, 2017).

Teori *rent-seeking* menyatakan bahwa korupsi menghambat optimalisasi sumber daya, dimana individu atau kelompok mencari keuntungan pribadi tanpa kontribusi produktif, sehingga mengurangi efisiensi ekonomi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Ningsih et al., 2021). Selaras dengan penelitian (Witari, 2018), korupsi memiliki dampak signifikan dalam menghambat pertumbuhan ekonomi. *Pertama*, melemahkan kemampuan pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar, bahkan memperburuknya. *Kedua*, menciptakan distorsi insentif, mendorong individu untuk lebih fokus pada *rent-seeking* daripada aktivitas produktif, bahkan terkadang pada tindakan yang merugikan masyarakat. *Ketiga*, korupsi bertindak seperti pajak tidak resmi yang memerlukan biaya besar untuk suap dan negosiasi, dengan kesepakatan yang sering tidak stabil. *Keempat*, merusak peran pemerintah dalam melindungi hak kepemilikan.

Kemiskinan

Kemiskinan timbul akibat ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka hingga mencapai standar yang dianggap layak secara manusiawi (Maulana & Fasa, 2022). Kemiskinan diartikan sebagai kondisi dibawah garis nilai standar kebutuhan dasar, baik pada makanan ataupun non makanan yang disebut dengan garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*) (Ferezagia, 2018). Garis kemiskinan merupakan sejumlah rupiah atau batas minimum pengeluaran rupiah yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar 2100 kalori per orang per hari ataupun Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta barang dan jasa lainnya (Masruroh & Zuber, 2014).

Teori lingkaran setan kemiskinan dikemukakan oleh Ragnar Nurkse yang menyatakan bahwa, kemiskinan terjadi akibat keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan



minimnya modal, yang menurunkan produktivitas (Salsabilla, Juliannisa & Triwahyuningtyas, 2022). Sejalan dengan penelitian (Wahyudi & Rejekingsih, 2013), penyebab kemiskinan dilihat berdasarkan ekonomi yaitu; Ketimpangan kepemilikan sumber daya yang memicu ketidakmerataan pendapatan; Perbedaan kualitas sumber daya manusia satu sama lain; Kesenjangan akses permodalan. Sehingga pada akhirnya ketiga faktor ini mengarah pada lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Pengangguran

Pengangguran (*unemployment*) didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana seorang individu yang termasuk ke dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Somba et al., 2021). Menurut (Novriansyah, 2018), Angkatan kerja (*Labor Force*) adalah bagian dari penduduk; Berusia antara 15 sampai dengan 65 tahun; Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja; Sedang mencari pekerjaan, orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya yaitu, ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

Pengangguran terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah minimnya akses terhadap informasi mengenai pasar kerja, pemutusan hubungan kerja akibat penutupan atau pengurangan aktivitas bisnis oleh perusahaan yang terdampak krisis ekonomi, kondisi keamanan yang tidak stabil, regulasi yang menghambat investasi, berkurangnya investor, kendala dalam proses ekspor dan impor, dan lain - lain (Mulyadi, 2017). Menurut (Fajri & Iriani, 2022), penyebab utama pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Ketika permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, produsen akan meningkatkan produksinya, sehingga akhirnya membutuhkan lebih banyak

tenaga kerja. Oleh karena itu, pendapatan nasional dan tingkat pemanfaatan tenaga kerja berkaitan erat. Semakin besar pendapatan nasional, semakin tinggi tingkat penggunaan tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses berkelanjutan yang mengubah kondisi perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu, yang tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional (Sujidno & Febriani, 2023). Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam lingkup nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam cakupan wilayah (Septiatin et al., 2016). Sementara itu, Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu (Dewi, Bahtiar & Rahman, 2024).

Dalam teori Keynes, prestasi ekonomi suatu negara ditentukan oleh pengeluaran agregat, yaitu total belanja masyarakat untuk barang dan jasa (Natasya & Saputra, 2023). Permintaan agregat, yang meliputi pengeluaran rumah tangga (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), dan permintaan oleh sektor luar negeri akan barang ekspor dan impor (X-M) merupakan faktor utama penentu output dan pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *World Bank*, *Transparency International*, dan *Asean Statistics*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data panel dengan periode 2015 - 2023 yang berfokus pada delapan negara anggota Asean, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Variabel yang dianalisis meliputi Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, dan Pengangguran sebagai variabel independen, sementara Pertumbuhan Ekonomi menjadi variabel dependen. Berikut ditunjukkan uraian variabel penelitian

Tabel 1. Deskripsi Variabel

Nama	Simbol	Pengukuran	Sumber
Indeks Persepsi Korupsi	IPK	0 – 100 0 – 19 (sangat korup) 20 – 39 (cenderung korup) 40 – 59 (rentan korup) 60 – 79 (cenderung bersih) 80 – 100 (sangat bersih)	<i>Transparency International</i> (transparency.org)



Kemiskinan	POV	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^2$	Asean Statistical Highlights
Pengangguran	UNM	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	
Pertumbuhan Ekonomi	GDP	$Y = \frac{PDB_t - (PDB_t - 1)}{(PDB_t - 1)} \times 100$	World Bank (worldbank.org)

Analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan program E-Views13 untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara individu (parsial) maupun bersamaan (simultan). Pengaruh dianggap signifikan jika nilai p-value < α (0,05) (Nugraha,

2022). Model ekonometrika yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

$$GDP_{it} = \alpha + \beta_1 IPK_{it} + \beta_1 POV_{it} + \beta_1 UNM_{it} + e_{it}$$

PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Median	Maximum	Minimum	SD
GDP	72	6.897	7.120	14.502	-0.184	2.621
IPK	72	3.486	3.526	3.970	2.995	0.248
POV	72	2.445	2.591	3.246	-0.916	0.713
UNM	72	0.826	0.875	2.332	-2.302	0.943

Sumber: Penulis, data diolah (Eviews13) 2025

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif delapan negara ASEAN yaitu, Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam pada periode 2015–2023. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum -0,184, maksimum 14,502, rata-rata 6,897, dan standar deviasi 2,621. Karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, maka data tersebar merata. Standar deviasi mencerminkan penyimpangan, sehingga distribusi data cenderung normal dan bebas dari bias. Selanjutnya, IPK memiliki nilai minimum 2,995, maksimum 3,970, rata-rata 3,486, dan standar deviasi 0,248. Karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, maka data tersebar merata. Kemudian variabel kemiskinan memiliki nilai minimum -0,916, maksimum 3,246, rata-rata 2,445, dan standar deviasi 0,713. Karena nilai rata-

rata lebih besar dari standar deviasi, maka data tersebar merata. Terakhir variabel pengangguran memiliki nilai minimum -2,302, maksimum 2,332, rata-rata 0,826, dan standar deviasi 0,943. Variabel pengangguran memiliki nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi, maka data ini cenderung tidak stabil dan memiliki banyak variasi antar observasi.

Hasil Regresi

Menurut (Iqbal, 2015), untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat tiga teknik (model) yang sering ditawarkan, yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Ketiga teknik estimasi data panel pada dasarnya dapat dipilih berdasarkan kondisi penelitian dengan menggunakan beberapa uji

Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel

Variabel	Probabilitas	Keterangan
Uji Chow	0.000	H_0 ditolak, <i>Fixed Effect</i> lebih baik
Uji LM	Breusch-Pagan LM = 0.000	H_0 ditolak, <i>Random Effect</i> lebih baik

Sumber: Penulis, data diolah (Eviews13) 2025

Berdasarkan tabel 3 hasil menunjukkan model terbaik untuk penelitian ini yaitu *Random Effect Model*

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Coefficient VIF	Uncentered VIF	Centered VIF
----------	-----------------	----------------	--------------



IPK	3.547	462.644	2.301
POV	0.342	23.671	1.834
UNM	0.145	2.421	1.362

Sumber: Penulis, data diolah (Eviews13) 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4, model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas antar variabel bebas. Hal ini

terjadi karena keseluruhan variabel memiliki nilai *Centered Variance Inflation Factor* < 10

Hasil Penelitian

Tabel 5. Hasil Penelitian

Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas	Keterangan
C	1.442	0.167	0.867	
IPK	1.582	0.694	0.489	H1: ditolak
POV	0.383	0.628	0.531	H2: ditolak
UNM	-1.211	-3.085	0.002	H3: diterima
<i>R-squared</i>		: 0.124		
<i>Adjusted R-squared</i>		: 0.085		
F-statistik		: 3.216		
Prob(F-statistik)		: 0.028		

Sumber: Penulis, data diolah (Eviews13) 2025

Berdasarkan tabel 5, hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Asean. Sementara itu, variabel Indeks Persepsi Korupsi dan Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Asean.

Pengangguran memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada delapan negara Asean tahun 2015 - 2023 yang menjadi fokus penelitian. Artinya, peningkatan angka pengangguran menyebabkan penurunan pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan hukum Okun, yang menjelaskan hubungan negatif antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan studi empirisnya, Okun menemukan bahwa peningkatan 1% pada pengangguran menyebabkan penurunan 2% pada GDP (Septiatin et al., 2016). Penelitian ini membuktikan adanya keterkaitan dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa perekonomian tidak selalu dapat mencapai tingkat pekerja penuh (*full employment*), yang berarti bahwa sumber daya, terutama tenaga kerja, tidak selalu dapat dimanfaatkan secara optimal dalam ekonomi (Ulfa Rasyida, 2021). Hal ini terjadi disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat, yang kemudian akan menurunkan minat pelaku usaha untuk berinvestasi akibat ketidakstabilan permintaan di pasar (Murni, 2006). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang baik dapat tercapai jika tingkat pengangguran dapat

dihilangkan. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian (Bachtiar, 2019), yang menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kemiskinan tidak secara langsung menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan faktor utama dalam upaya pengentasan kemiskinan pada delapan negara Asean tahun 2015 - 2023. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Retno, 2013), yang menyatakan bahwa kemiskinan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Indeks Persepsi Korupsi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil studi ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian (Akman and Sapha, 2018), yang menyatakan bahwa hal ini terjadi karena variasi variabel lain yang tidak terukur dalam penelitian. Pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi langsung oleh indeks persepsi korupsi, karena dampak buruk yang ditimbulkan berakibat pada inefisiensi proses produksi dan misalokasi sumber daya (Lutfi et al., 2020). Sementara itu, hasil penelitian yang sama dengan temuan (Swaleheen and Stansel, 2007). Berdasarkan studi empirisnya, pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi

bergantung pada tingkat kebebasan ekonomi di suatu negara. Di negara dengan kebebasan ekonomi tinggi, korupsi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi karena mempercepat proses bisnis dengan melewati birokrasi yang lambat atau regulasi yang ketat. Sebaliknya, di negara dengan kebebasan ekonomi rendah, korupsi justru akan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena menambah beban biaya bagi pelaku usaha dan menciptakan ketidakpastian hukum, yang kemudian akan menghambat investasi dan inovasi. Sehingga di negara-negara Asean yang menjadi fokus penelitian, pengaruh korupsi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena adanya perbedaan kondisi antar negara.

Secara bersamaan, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, dan Pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil yang sesuai dengan penelitian (Wada, 2018), yang menyatakan secara tidak langsung bahwa Pengangguran, Kemiskinan, dan Korupsi memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Studi tersebut mengidentifikasi pengangguran dan kemiskinan sebagai penyebab korupsi. Hal ini terjadi karena upaya penciptaan lapangan kerja tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan tetapi juga menekan tingkat korupsi di Nigeria. Sehingga, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan berkontribusi pada pengurangan korupsi, serta menstimulasi pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan di Nigeria.

Penelitian ini didukung dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa investasi dapat terhambat dan efektivitas kebijakan fiskal serta belanja pemerintah akan rusak karena korupsi, akibat dari dana yang seharusnya digunakan untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan ekonomi justru terbuang dalam praktik-praktik yang tidak produktif (misalokasi sumber daya). Sehingga, praktik korupsi menyebabkan keraguan investor untuk berinvestasi (Rahmiati, Gunawan, Thamliha, and Iqbal Hafiz, 2024). Dalam situasi dimana investasi perusahaan rendah, maka proyek baru yang dapat menciptakan lapangan kerja menjadi terhambat sehingga tenaga kerja tidak dapat terserap secara optimal (Agung Laksana and Purnomo, 2022) dan produktivitas akan menurun yang menyebabkan minimnya pendapatan yang kemudian akan memperburuk kemiskinan (Salsabilla et al., 2022). Dalam hal ini, pemerintah perlu campur tangan seperti peningkatan belanja publik (infrastruktur, subsidi, dll) untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini

bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Namun, tetap dengan memastikan efisiensi dalam penggunaan dana publik.

Menurut Islam, korupsi adalah tindakan amoral yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur seorang muslim. Seorang muslim setidaknya harus memiliki sifat seperti junjungannya yaitu nabi Muhammad SAW yang salah satunya yaitu *al shadiq* (jujur) dan *al amin* (amanah). Sementara itu, koruptor memiliki sifat yang berkebalikan yaitu *al thama* (serakah) dan *al kadzib* (penipu) (Kencana, 2017). Tindakan ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip dan tujuan dari ekonomi Islam. Al-Qur'an menjadi sumber utama ekonomi Islam yang menyatakan dalam Q.S an-Nisa : 58 bahwa ayat tersebut secara jelas telah memerintahkan manusia untuk dapat menjalankan amanah yang dipegangnya, memenuhi janji, dan berlaku adil. Penghianatan terhadap sebuah amanah dan janji adalah kesalahan yang bisa dituntut di pengadilan, yang berarti pelaksanaan amanah dan pemenuhan janji merupakan ajaran yang sangat penting dalam ekonomi islam (Kholis, 2018).

Kemiskinan dalam Islam dipandang sebagai satu hal yang dapat membahayakan akhlak, berpikir logis, keluarga, dan masyarakat. Islam menganggap kemiskinan sebagai musibah dan bencana sehingga harus memohon perlindungan kepada Allah SWT. atas kejahatan yang terdapat didalamnya (Kiky Aprianto, 2017).

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk bekerja keras dan cerdas. Lebih dari itu, Islam menjadikan bekerja sebagai sebuah kewajiban dan memberikan balasan yang setimpal. Disisi lain, Islam menilai bekerja sebagai salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. sehingga bekerja dinilai sebagai bentuk ibadah, karena dengan bekerja berarti seseorang telah mengolah sumber daya alam yang disediakan oleh Allah SWT. Islam sangat menekankan kepada umatnya agar tidak terjebak dalam pengangguran dan terjatuh ke dalam jurang kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa kondisi miskin dapat memaksa seseorang untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain demi memenuhi kebutuhan pribadi mereka (Hendri Doni, Alfiona, Andespa, and Al-Amin, 2023). Dalam agama Islam, orang yang memiliki harta lebih wajib untuk mendistribusikan sebagian dari rezekinya untuk meringankan beban orang lain. Bahkan, Allah mengecam orang kaya yang enggan berbagi dengan memasukkan mereka sebagai pendusta



agama. Meskipun Islam mengajarkan pentingnya berbagi rezeki antara yang kaya dan miskin, Islam tidak menganjurkan seseorang untuk bergantung sepenuhnya pada orang lain. Oleh karena itu, Islam mengecam orang yang malas berusaha dan bekerja, kecuali ada alasan syar'i yang membenarkannya (Subhan, 2018).

Untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi dalam islam, maka tujuan dan sasarannya harus sesuai dengan ajaran Islam. Tidak ada larangan untuk seorang individu mengambil manfaat dari sebagian pemahaman dan hukum ekonomi konvensional dalam menghadapi masalah ekonomi, selama pemahaman tersebut tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Pemahaman pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam Q.S 7 : [96] :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَا
رُحْصٍ وَلَٰكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ

"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 96).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketaqwaan, kebaikan, penjagaan terhadap penciptaan-Nya, dan ketaatan kepada aturan Allah SWT. menjadi hal yang penting dalam mendatangkan rezeki dan kemajuan ekonomi. Sebaliknya, tindakan yang berkaitan dengan kemaksiatan dan kekufuran justru akan menyebabkan kemungkaran-Nya dan hilangnya ketenangan dan kedamaian hidup (Zainuddin, 2017).

Prinsip dari pertumbuhan ekonomi dalam Islam berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadist. Namun, penjelasannya tidak merinci secara detail, dikarenakan penjelasannya hanya secara global dan keseluruhan, yang berkaitan dengan petunjuk pokok, kaidah-kaidah, prinsip, dan cabang-cabang penting yang spesifik, karena masalah ekonomi termasuk masalah kemanusiaan yang bisa saja mengalami perubahan sesuai dengan lingkungan dan zamannya, sementara masalah yang bersifat teknis diselesaikan dengan ijtihad para ulama disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan zamannya (Gunawan, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil regresi data panel terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Asean

selama periode 2015-2023 menunjukkan bahwa; *Pertama*, variabel Indeks Persepsi Korupsi secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun korupsi menjadi isu penting, keberadaannya tidak secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, variabel Kemiskinan memiliki pengaruh yang tidak signifikan secara parsial. Artinya, meskipun kemiskinan sering dikaitkan dengan berbagai permasalahan ekonomi, dalam penelitian ini tidak ditemukan bukti kuat bahwa tingkat kemiskinan secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, variabel Pengangguran secara parsial terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Dengan kata lain, meningkatnya angka pengangguran cenderung memperlambat pertumbuhan ekonomi di Asean. Terakhir, variabel Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, dan Pengangguran secara simultan ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Asean selama periode 2015-2023. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara individu Indeks Persepsi Korupsi dan Kemiskinan tidak berpengaruh secara langsung, namun dalam kombinasi dengan Pengangguran, ketiga variabel tersebut secara bersama memainkan peran penting dalam dinamika pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN.

SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah negara anggota Asean dalam merumuskan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat menekan tingkat korupsi. Selain itu, perlu pula difokuskan pada program penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan belanja publik (infrastruktur, subsidi, dll) untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, yang secara bersamaan diharapkan akan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Dengan demikian, pembangunan ekonomi di Asean diharapkan dapat dicapai secara inklusif dan berkelanjutan.

Mempertimbangkan keterbatasan dalam penelitian ini, disarankan agar studi selanjutnya memperluas cakupan dengan tidak hanya mengenai variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperpanjang periode pengamatan dan meningkatkan jumlah sampel. Selain itu, sebaiknya penelitian berikutnya mempertimbangkan variabel tambahan di luar yang telah digunakan, dengan tetap merujuk pada penelitian terdahulu untuk memperoleh hasil



regresi yang lebih signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Laksana, Y., and Purnomo, D. (2022). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Foreign Direct Investment terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal Balit Bangda Lampung*, 12. Retrieved from <http://journalbalitbangdalamampung.org>
- Akbar, A., and Rozani, A. (2021). Pengaruh Petumbuhan Ekonomi Human Development Index Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Kemiskinan Di 5 Negara Asean. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, 19(3).
- Akman, B., and Sapha, D. (2018). Pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3(4), 531–538.
- Ambya, and Ciptawaty, U. (2022). Hubungan Antara belanja Pemerintah, Tingkat Kemiskinan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Lampung. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 2085–1960.
- Anna Sasmita, O., Anggraeni, E., and Hilal, S. (2023). Analisis Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 1006–1011. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1025>
- Bachtar, A. Z. (2019). Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2).
- Dabla-Norris, E., and Sophia Zhang, Y. (2021). Vietnam: Successfully Navigating the Pandemic. Retrieved January 26, 2025, from International Monetary Fund website: <https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/09/na031021-vietnam-successfully-navigating-the-pandemic>
- Damanik, M. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ekuilnومي*, 4(2), 142-154
- Damanik, D., & Saragih, M. (2023). Korupsi, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Jurnal Ekuilnومي*, 5(1), 71-81
- Diniarty, E. P., Wijumulawiani, B. S., & Anggara, J. (2025). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Per Kapita, Inflasi, Tingkat Pengangguran Dan Harga Terhadap Permintaan Perumahan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014–2023. *Jurnal Ekuilnومي*, 7(1), 79-84
- Fajar, M., and Azhar, Z. (2018). Indeks Persepsi Korupsi Dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-negara Asia Tenggara. *EcoGen*, 1(3), 681–690.
- Fajri, A. A., and Iriani, R. (2022). Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali Tahun 2002-2021. *EkoPem :: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 53–66.
- Freedom In The World 2024: The Mounting Damage of Flawed Elections and Armed Conflict. (2024). Retrieved from www.freedomhouse.org.
- Gunawan, M. H. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Tahkim*, 16(1).
- Hendri Doni, A., Alfiona, F., Andespa, W., and Al-Amin. (2023). Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Kovensional. *JEMAS: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 2(3), 2023–2024. <https://doi.org/10.55883/jiemas.v2i3>
- Human Development Report 2023/2024: Reimagining Cooperation In A Polarized World. (2024).
- Iqbal, M. (2015). Regresi Data Panel (2) “Tahap Analisis.” Blog Dosen Perbanas, 2. Retrieved from <http://dosen.perbanasinstitute.ac.id>
- Iqbal, M., Hakim, L., and Aziz, M. A. (2024). Determinants of Islamic Bank Stability in Asia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2022-0174>
- Kencana, U. (2017). Korupsi Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Muamalah*, 3(1).
- Kholis, N. (2018). Korupsi Dan Akibatnya: Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Religious Studies*.
- Kiky Aprianto, N. E. (2017). Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).
- Lutfi, A. F., Zainuri, and Diartho, H. C. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan*



- Akuntansi, 7(1), 30–35.
- Masruroh, Y., and Zuber, A. (2014). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 70–90.
- Maulana, A., and Iqbal Fasa, M. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(01).
<https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1>
- Maulana, I., Salsabila, Z., & Dermawan, D. (2022). Pengaruh Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Dan PDRB Terhadap IPM Di Wilayah Provinsi Banten Pada Tahun 2019–2021. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(2), 164–170
- Mulyadi, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Dalam Masyarakat. *Kajian*, 21(3), 221236.
- Murni, A. (2006). *Ekonomika Makro*. Bandung: Refika Aditama.
- Natasya, and Saputra, P. M. A. (2023). Analisis Pengaruh Inflasi, Ekspor, Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(1), 11–25.
<https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.1.2>
- Nadeak, M. F., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2022). Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Samosir. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 75 –. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.339>
- Ningsih, K., Juliprijanto, W., and Melani Hutajulu, D. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi, Investasi, Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2019. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 3(2), 444–462.
- Novriansyah, M. A. (2018). Pengaruh Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 59–73.
- Nugraha, B. (2022). Pengembangan Uji Statistik: Implementasi Metode Regresi Linier Berganda dengan Pertimbangan Uji Asumsi Klasik (1st ed.; M. A. Susanto, Ed.). Jawa Tengah: Pradina Pustaka Group.
- Purba, W., Nainggolan, P., & Panjaitan, P. D. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 62–74.
<https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.336>
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Rahmiati, Gunawan, R., Thamliha, A., and Iqbal Hafiz, M. (2024). Dampak Korupsi terhadap Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 01(01), 22–29.
- Rasyidi, M. A. (2015). Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. *Academia Publication*, pp. 37–51.
- Retno, K. E. (2013). Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Salsabilla, A., Arrafi Juliannisa, I., and Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ikraith-Ekonomika*, 5(2), 96–105.
- Sanniana Sidabutar, Elidawaty Purba, & Pawan Darasa Panjaitan. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(2), 86–101.
<https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i2.109>
- Septiatin, A., Mawardi, and Rizki Mohammad Ade Khairur. (2016). Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *I-Economic*, 2(1), 50–65. Retrieved from www.bi.go.id
- Sinaga, M., Damanik, S. W. H., Zalukhu, R. S., Hutaeruk, R. P. S., & Collyn, D. (2023). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Per Kapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kepulauan Nias. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 140–152
- Somba, A., Engka, D. S. M., and Sumual, J. I. (2021). Analisis Pengaruh Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(05), 63–74.
- Subhan, M. (2018). Pengangguran Dan Tawaran



- Solutif Dalam Perspektif Islam. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(2). Retrieved from <http://www.bps.go.id>
- Sujidno, R., and Febriani, R. E. (2023). Pengaruh Korupsi, Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah Uang Beredar (M2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di ASEAN. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 9(2), 205–220. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i2.202>
- Swaleheen, M. us, and Stansel, D. (2007). Economic Freedom, Corruption, and Growth. Cato Journal, 27(3).
- Syaputra, D. A., Prakasita, D. G., Aulia, C., Roring, D., and Aditama, F. (2020). Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Kommuniti Online, 1(2), 92–110. Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jko>
- Ulfa Rasyida, N. (2021). Kajian Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Di Indonesia Periode 1990-2019. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 9(2), 1–13.
- Visca Dewi, S., Yusuf Bahtiar, M., and Rahman, T. (2024). Analisis Pengaruh PMDN dan PMA terhadap PDB di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research, 8(4), 860–875. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v8i4.1643>
- Vita Ferezagia, D. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Sosial Humaniora Terapan, 1(1).
- Wada, E. O. (2018). Unemployment, Poverty And Corruption In Nigeria (Classical Least Squares Double Log And Linear Trend Analysis Models). Online Journal Of Multidisciplinary Subjects, 12(1).
- Wahyudi, D., and Rejekingsih, T. W. (2013). Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah. Diponegoro Journal Of Economics, 2(1).
- Wihelms, O. R. (2017). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya. JPAK (Jurnal Pendidikan Agama Katolik), 17(9). Retrieved from <http://www.fuzzi.cs.uni-magdeburg.de/-borgelt/apriori/>.
- Witari, A. A. (2018). Analisis Pengaruh Korupsi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Kesenjangan Sosial Terhadap Kemiskinandi 16 Provinsi Indonesia Periode 2004, 2006, 2008 Dan 2010.
- Winarti, V. P., Erliantari, F., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten 2017–2021. Jurnal Ekuilnomi, 4(2), 155-163
- Yoga, G. A. D. M., & Diputra, G. I. S. (2024). Analisis Data Panel Determinan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. Jurnal Ekuilnomi Yoga, G. A. D. M., & Diputra, G. I. S. (2024). Analisis Data Panel Determinan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. Jurnal Ekuilnomi
- Zainuddin, M. (2017). Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam. Istithmar, 1(2).

